

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
05 Agustus 2006**

“Pendidikan IPS Sebagai Wahana Memupuk Modal Sosial Nasional”



Editor:

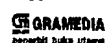
Siti Fadjarajani
Kokom Komalasari
Yasmin
Teguh C. Dalyono

ISBN: **979-15127-0-1**

*Isi makalah-makalah pada prosiding ini sepenuhnya tanggung jawab Penulis,
Editor hanya menyusun dan mengedit format penulisan.
Hak cipta dilindungi Undang-undang*

**Penyelenggara dan Penerbit:
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

acara ini terselenggara berkat kerja sama dengan:



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Rekonstruksi Modal Sosial di Era Reformasi Melalui Integrasi Ilmu Pendidikan Dengan Pendidikan IPS di Institusi Pendidikan <i>Drs. Abdul Hadis, M.Pd.</i>	AH 01-08
Pendidikan IPS Sebagai Model Pendidikan Multikultural <i>Prof. DR. Abu Su'ud</i>	AS 01-07
<i>Agency dan Mentalite: Pendekatan Dalam Memahami Perubahan Sosial</i> <i>Dr. Agus Mulyana, M.Hum.</i>	AM 01-11
Transformasi dan Internalisasi Nilai Disiplin Ilmu sebagai Investasi Modal Sosial Nasional <i>Drs. Benny A. Benyamin, M.Pd.</i>	BB 01-13
<i>On Cooperation and Competition: Interdependence Psychology</i> <i>Dr. Cholichul Hadi</i>	CC 01-22
Hubungan Guru Dan Murid Terhadap Perkembangan Pendidikan Dalam Menunjang Kepribadian Anak <i>Dyah Satya Yoga Agustin</i>	DS 01-11
Pentingnya Pemahaman Dini Makna Pluralitas Dalam Masyarakat Indonesia Sebagai Pendukung Pendidikan Sosial-Budaya <i>Ekna Satriyati, SS., M.Hum.</i>	ES 01-10
Kontribusi Pendidikan Geografi dalam Mengembangkan Modal Sosial untuk Menuju Keunggulan Berbangsa dan Bernegara <i>Dr. Enok Maryani M.Si.</i>	EM 01-10
Disiplin Geografi Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Mengembangkan Modal Sosial <i>Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S.</i>	BA 01-08

Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS (Sebuah Sarana Alternatif Menuju masyarakat Madani) <i>Isnarmi Moeis</i>	IM 01-10
Pengembangan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan IPS Di Era Global <i>Kokom Komalasari, M.Pd.</i>	KK 01-12
Strategi Penguatan Modal Sosial Melalui Pendidikan (Belajar Dari Masyarakat Desa) <i>Dr. Kushandajani</i>	KH 01-10
Konflik Ruang Publik Dan Penguatan Modal Sosial (<i>Social Capital</i>) Masyarakat Kampung Kota (Studi Kasus Konflik Jalan Lingkungan Di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung) <i>Lilis Widaningsih, S.Pd., MT.</i>	LW 01-12
Memupuk Modal Sosial Nasional Dengan Melalui Pendidikan IPS: Aplikasi Kerjasama (<i>Cooperation</i>) Dalam Pendidikan IPS <i>Lucy Yosita, ST., MT.</i>	LY 01-12
Model Pembelajaran Holistik dalam Pengembangan Keterampilan Berfikir Kesejarahan <i>Murni, Dra., MA.</i>	MN 01-33
Penggunaan Media Kartun dalam Pembelajaran <i>Nana Supriatna dan Ikeu Hermi</i>	NS 01-07
Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial <i>Pupu Saeful Rahmat, Drs., M.Pd.</i>	PS 01-05
Objektivikasi Pancasila Sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis Dalam Pendidikan Kewarganegaraan <i>Samsuri, M.Ag.</i>	SS 01-10
Komputer Akuntansi <i>Dra. Silviana Agustami, M.Si. Ak.</i>	SA 01-05

Paradigma Baru Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan Global <i>Siti Fadjarajani, MT.</i>	SF 01-10
Tanggungjawab Ilmu Menurut Teori Kritis dan Relevansinya Di Indonesia <i>Soedarso, M.Hum.</i>	SD 01-07
Rekonstruksi Pendidikan IPS Pada Sekolah-Sekolah di Bali Dalam Rangka Ajeg Bali (Suatu Kajian Sosio Budaya Terhadap Pengembangan Program Pendidikan IPS di Bali) <i>Drs. Sukadi, M.Pd., M.Ed.</i>	SK 01-13
Pengembangan Sikap Demokrasi Siswa Sekolah Dasar Pada Pelajaran PKNPS <i>Dr. Tukiran</i>	TK 01-08
Wacana Pendidikan Multikultural (Suatu Analisis terhadap masalah- masalah sosial) <i>Windiani, M.Si</i>	WD 01-07



SEMINAR NASIONAL TAHUN 2006
PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG
"Pendidikan IPS sebagai Wahana Menujuk Modal Sosial Nasional"
Auditorium JICA FPMIPA UPI Bandung, Sabtu - 05 Agustus 2006



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRANSFORMATIF DALAM PIPS
Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani

Oleh:
Isnarmi Moeis
Staf Pengajar Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Satu di antara kekayaan bangsa Indonesia yang tergolong unik adalah kemajemukan masyarakat dari segi etnik, bahasa, dan agama yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa membuktikan sering kali gejolak dan pertikaian antar warga berujung pada persatuan. Namun akhir-akhir ini pertikaian antar warga justru memperlihatkan arah sebaliknya, yang tampak pada kecenderungan meningkatnya keinginan sekelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini dapat ditenggarai sebagai langkah mundur untuk memuji masyarakat madani Indonesia yang religius, bersatu, adil, dan sejahtera. Atas dasar fenomena ini muncul pertanyaan apa penyebab menurunnya kemauan sekelompok masyarakat untuk hidup bersatu dalam satu Negara Kesatuan bersama kelompok lainnya? Dan bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah gejala negatif tersebut.

Makalah ini mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pembahasan tentang Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS. Pendidikan ini memiliki karakteristik antara lain yaitu 1) dikembangkan berdasarkan fenomena hubungan-konflik antar etnik di Indonesia, 2) berorientasi pada Filsafat dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) menggunakan pendekatan kritis-transformatif, dan 4) bersifat multidisiplin.

Kata kunci: multikulturalisme, pendidikan multikultural, transformasi diri dan sosial, pendekatan kritis

PENDAHULUAN

Kenyataan Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural merupakan kebanggaan sekaligus kecemasan. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 665 bahasa daerah, dan 300 suku bangsa yang tersebar pada 17.670 pulau besar dan kecil (www.infoplease.com/2004). Di satu sisi, fakta ini membuat kebanggaan tersendiri karena semua keragaman itu bersatu dalam kesatuan wilayah negara Indonesia yang telah dikukuhkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga menjadi kekayaan kultural dan sosial

bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, fakta ini sesungguhnya mengandung potensi konflik yang dapat memecah belah negara kesatuan Indonesia.

Sejak reformasi banyak konflik yang muncul ke permukaan baik bernuansa politik, atau bernuansa etnik, agama, maupun hanya sekedar perwujudan rasa ketidak puasan. Selama tiga dekade atau lebih, fenomena keanekaragaman budaya seakan tenggelam dalam kesatuan budaya bangsa sebagai bagian dari upaya "*national and character building*". Keanekaragaman budaya yang tumbuh dari kebudayaan daerah, justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam dasar kebudayaan nasional yang semakin rasional, fungsional, dan berwawasan universal (Sarasehan dalam rangka HUT XXV Kompas, 1990 "Menuju Masyarakat Baru Indonesia"), tetapi juga sering bernuansa politis, sentralistis, dan kecurigaan terhadap kebudayaan daerah. Jika ada pada waktu itu keanekaragaman yang muncul ke permukaan, hanyalah sebagai simbol kekuasaan dan sebagai upaya mempertahankan kontrol atas suatu masyarakat yang sangat beragam dan berbeda (Bloomfield cs, 2000: 34). Konsekwensi semua itu adalah kaburnya makna keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman etnik, karena dilebur dalam sistem yang mengutamakan penyeragaman sebagai kontrol dan aturan perilaku masyarakat Indonesia yang beragam. Karena fenomena keragaman selama ini ditekan ke bawah permukaan, maka pada saat tekanan dilepaskan justru berbalik menjadi sentimen etnik yang setiap saat dapat memicu konflik dengan etnik lain.

Di satu sisi disadari bahwa keragaman etnik dalam negara bangsa Indonesia menghendaki perhatian yang lebih serius melalui dunia pendidikan. Terjadinya berbagai kerusuhan massa dan konflik akhir-akhir ini, merupakan bukti dari rasa nasionalisme bangsa Indonesia mengalami kemunduran, dan rasa partikularisme lokal - di propinsi tertentu - cenderung meningkat (Azra, 2003: 74). Di pihak lain struktur yang ada tidak mampu menyelesaikan konflik dalam waktu yang singkat. Keadaan ini diperparah dengan semakin membudayanya kekerasan dalam masyarakat Indonesia disebabkan faktor media yang semakin mengglobal, dan juga akumulasi kebencian dalam masyarakat (Suseno, 2003:122). Oleh karena itu, peran pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan konflik agar situasi tidak semakin memburuk.

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas di atas, melalui makalah singkat ini, penulis mengemukakan satu alternatif pemecahan dari sudut pandang pendidikan, yang difokuskan pada pembahasan mengenai peran Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS.

PEMBAHASAN

Selama ini dalam pendidikan, khususnya PIPS, fenomena keragaman budaya dan etnik dilihat hanya sebagai kebanggaan. Keragaman dibicarakan sebatas potensi kekayaan bangsa yang patut dikembangkan, namun tidak dibahas lebih dalam bagaimana mewujudkan potensi itu menjadi kekayaan yang aktual,

dan bagaimana mencegah akibat negatif yang ditimbulkan keragaman tersebut.

Memang saat ini, di sekolah ada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mencakup berbagai bidang-bidang studi seperti Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan bahkan Pendidikan Kewargaan Negara, Sosiologi/Antropologi (NCSS, 1994: 157; Somantri 2001: 85). Namun, tidak ada dari bidang-bidang pelajaran tersebut yang bersentuhan langsung dengan pendidikan multikultural, kecuali pada pelajaran sosiologi untuk kelas 2, berdasarkan kurikulum 2004 ada satu topik dengan ruang lingkup sangat terbatas pada satu kompetensi dasar yaitu mengembangkan sikap dalam masyarakat multikultural.

Bagi masyarakat Indonesia, kenyataan sebagai masyarakat multikultural tidak dipungkiri lagi. Begitu juga harapan ke depan mewujudkan masyarakat multikultural yang saling menghormati dan mampu hidup berdampingan secara damai (masyarakat multikultural yang demokratis) merupakan cita-cita semua orang. Akan tetapi jurang antara kenyataan dan harapan masih sangat luas dengan ditemukannya berbagai persoalan seperti: masih berkobarnya konflik etnik baik horizontal maupun vertikal yang seolah berkepanjangan, belum adanya bentuk kurikulum pendidikan yang secara khusus berbicara tentang hubungan-konflik antar etnik, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang makna multikultural dalam kehidupan masyarakat, atau konsep multikultural baru sebatas wacana di kalangan akademisi.

Menurut sudut pandang pendidikan, kondisi masyarakat Indonesia yang beragam secara etnik masih merupakan potensi yang perlu dikembangkan melalui program dan kurikulum pendidikan yang khusus dan terarah kepada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan multikultural di kalangan siswa. Namun, bentuk pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer begitu saja dari negara lain yang sudah lama mengembangkan pendidikan ini. Setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan multikulturalisme yang berbeda sehingga melahirkan bentuk pendidikan yang juga unik. Oleh karena itu, perlu dikenali lebih dahulu karakteristik keragaman bangsa Indonesia.

Dari berbagai fenomena persoalan etnik di berbagai negara, para ahli sebenarnya hampir sepakat mengemukakan bahwa potensi konflik dalam satu masyarakat dapat berkurang jika interaksi antar kelompok-kelompok yang berbeda berlangsung setara, tidak diskriminatif, dan berlangsung dalam manajemen pemerintahan yang demokratis sehingga semua kelompok merasa mendapat perlakuan yang adil. Namun bagi bangsa Indonesia ada keunikan yang meminta perhatian tersendiri.

Dalam hubungan antar etnik di Indonesia, tidak ada dominasi mayoritas, karena hubungan antar kelompok berada dalam posisi yang setara. Masing-masing kelompok dengan identitas yang berbeda hidup dalam satu wilayah politik (Negara Kesatuan RI). Identitas setiap kelompok telah terbangun sejak lama, jauh sebelum bersatu dalam negara kesatuan dan berkembang terus bersamaan dengan perjalanan sejarah bangsa. Walaupun banyak para pengamat mengatakan bahwa selama pemerintahan orde baru identitas kelompok lebih diredam dengan cara

mengemukakan persatuan dan kesatuan, tetap saja ada kecenderungan orang untuk berafiliasi dalam kelompok yang sama identitas (Syahid, 2003).

Namun paradoks yang muncul karena kekentalan identitas kelompok dalam masyarakat Indonesia ini, adalah terciptanya hubungan intrakomunal yang tinggi, sementara hubungan interkomunal tetap rendah. Keadaan ini sangat rentan terhadap kecurigaan, konflik, dan kekerasan antar kelompok (Varshney, 2002: 12). Fenomena inilah yang tampak ketika memasuki era reformasi dengan terbukanya kran demokrasi serta diterapkannya otonomi daerah, yakni konflik antar kelompok muncul secara terbuka dan hampir serentak di beberapa daerah yang tingkat heterogenitas warganya tinggi.

Hampir dalam semua konflik ada pembeda identitas yang jelas antara kelompok yang bertikai seperti di Ambon (Maluku) dan Poso antara warga Muslim dengan warga Kristen, di Sambas dan Sampit antara warga pendatang (Madura) dengan warga asli (Dayak, Melayu). Semakin lama konflik berlanjut semakin kental pembedaan identitas, sehingga semakin sulit rekonsiliasi. Atas dasar inilah, kemudian banyak analisis yang cenderung melihat adanya keterlibatan pihak elit dalam memperpanjang konflik yang diidentifikasi dari adanya keterlibatan aksi premanisme, dan penyebaran isu yang memojokkan salah satu kelompok (provokasi) untuk mencapai tujuan politis (Makarim, 2005; Stewart, 2005; Suseno, 2003; Ai Qadrie, 2003). Model provokasi dan premanisme ini cenderung terlihat lebih jelas dalam masyarakat yang tersegregasi berdasarkan agama, khususnya Islam dan Kristen seperti di Ambon (Maluku) dan Poso. Secara logika aksi-aksi tersebut sulit dipahami sebagai tindakan yang didasarkan atas kemauan warga dari kalangan akar rumput, karena sangat terencana dan sistematis.

Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, adil, setara, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia adalah pada sisi masyarakat itu sendiri, yakni kesadaran untuk mengakui dan menghargai keragaman identitas dalam konteks kebersamaan satu warga bangsa. Atas dasar kesimpulan ini, pendidikan yang diperlukan dalam rangka mencegah konflik adalah pendidikan yang dapat membantu masyarakat menyadari keadaan yang telah memanfaatkan mereka, dan kemudian membantu masyarakat untuk melakukan transformasi diri dan lingkungan yang telah membuat pola pikir yang keliru bagi dirinya.

Pendidikan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan didasarkan pada landasan filsafat yang mendorong pelaku pendidikan mampu melakukan *self-transformation* dan *social-transformation* untuk menciptakan masyarakat harmonis dalam keragaman. Gagasan ini berakar dalam Filsafat Rekonstruksi Sosial (*Social Reconstruction*). Landasan filsafat tersebut juga sejalan dengan landasan psikologis dan pedagogis yang menjadi acuan operasional pendidikan, yaitu pandangan Psikologi Sosiohistoris-Kultural (*Socio-Historis and Cultural Psychology*), dan Pedagogi Kritis (*Critical Pedagogy*). Pada akhirnya, semua landasan ini menempatkan proses pendidikan sebagai bagian dari proses sosial, kultural, dan historis masyarakatnya. Pendidikan yang

dikembangkan dalam kerangka ketiga landasan tersebut adalah pendidikan **multikultural dengan paradigma transformatif**.

Pendidikan multikultural transformatif diharapkan dapat mendidik siswa memiliki kesadaran dan kemampuan agar bisa berpartisipasi dalam membangun masyarakat multikultural yang demokratis. Karakteristik mereka antara lain memiliki pengetahuan, nilai, dan keahlian yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif dengan orang dari berbagai etnik, ras, dan kelompok-kelompok budaya dalam rangka mengembangkan komitmen mereka mengambil tindakan yang menjadikan masyarakat dan bangsa mereka bermoral, berpihak kepada warga, dan setara (Banks, 1997: 1). Selain itu siswa tersebut diharapkan mempunyai pengetahuan, keterampilan kognitif, keterampilan partisipatoris, dan sikap warga negara yang hidup dalam masyarakat demokratis (Patrick, 1999: 34). Pendidikan juga diharapkan mengembangkan sikap toleransi berupa sikap *civil inattention* yang mencerminkan perilaku positif dan rileks terhadap orang yang berbeda, dan kejujuran dalam diri siswa berupa sikap sopan terhadap musuh atau lawannya (Suseno, 2003: 127).

Ciri-ciri pendidikan multikultural dalam kerangka transformatif, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan bukan sesuatu yang netral atau apolitis. Segala sesuatu yang terjadi dalam level kelembagaan memberi bekas kepada proses pembentukan pengetahuan siswa. Terhadap hal ini, guru perlu menyadarinya secara utuh.
- 2) Siswa dididik melihat fenomena kehidupan dalam kekomplekan isera berbagai perspektif yang tercakup di dalamnya.
- 3) Pendidikan multikultural memberi nilai tinggi keragaman, berfikir kritis, reflektif, dan kecakapan tindakan sosial.
- 4) Pendidikan multikultural adalah proses pemberdayaan siswa dan juga guru untuk mengambil tindakan-tindakan transformatif berdasarkan pemahaman yang benar tentang hak dan tanggungjawabnya.
- 5) Pendidikan multikultural bukan sekedar mengganti satu perspektif tentang kebenaran dengan perspektif lain, tetapi merefleksikan kebenaran itu atas dasar berbagai perspektif yang bahkan saling bertentangan, sehingga dapat memahami realitas secara utuh.
- 6) Pendidikan multikultural memungkinkan siswa mengidealkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, tetapi juga mendidik siswa untuk menerima realita nilai tersebut secara kritis.
- 7) Pendidikan multikultural dikembangkan berdasarkan sudut pandang dan pengalaman siswa, bukan dari budaya yang sudah mapan (Nieto, 1992: 219-221).

Dalam istilah Paulo Freire (2000: 46), pendidikan multikultural dengan paradigma transformatif adalah “proses humanisasi”. Praktek-praktek struktural, budaya hukum, dan kekuasaan yang berkembang selama ini dapat dikatakan

sebagai proses yang menciptakan “dehumanisasi” sehingga membawa kerentanan dalam hubungan masyarakat yang beragam seperti bangsa Indonesia.

Namun ada hal yang paling penting bahwa pendidikan multikultural transformatif ini bertolak dari kekhasan dan kebutuhan masyarakat majemuk di Indonesia, baik dalam konteks lokal maupun global. Arah pengembangannya didasarkan pada landasan filosofis bangsa sebagaimana telah digariskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 tentang dasar Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, lalu dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan pendidikan yakni agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Ada tiga konsepsi yang dapat ditarik dari kerangka filosofis bangsa tersebut yakni, **konsepsi tentang diri dan sistem keyakinan, konsepsi tentang masyarakat dan budaya, serta konsepsi tentang kehidupan politik dan bernegara.** Konsepsi tersebut dikembangkan dalam kerangka **penghargaan terhadap martabat manusia dalam perspektif lokal dan global.** Sehingga dengan demikian, pendidikan multikultural ini dapat berjalan seiring dengan disiplin lain yang berada dalam payung PIPS, yang harus dikembangkan dalam perspektif yang luas, yakni mencakup perspektif diri, perspektif akademik, perspektif pluralistik, dan perspektif global (Wiriaatmadja, 2002: 304).

Dalam kerangka pendidikan multikultural transformatif, konsepsi-konsepsi tersebut dikembangkan dalam makna-makna sebagai berikut:

1. Konsepsi diri, yakni pribadi yang beriman dan mampu melihat dan merefleksikan realita dengan multiperspektif, dan mampu mengambil tindakan transformatif untuk menciptakan suasana yang multikultural; pandangan ini juga berlaku dalam melihat orang lain sebagaimana diri sendiri, sehingga tumbuh sikap saling menghargai.
2. Konsepsi budaya (lembaga, sistem nilai, dan masyarakat), yakni sesuatu yang dapat dipahami, dipertanyakan, dikembangkan, dan ditransformasi dalam kerangka berfikir masyarakat multikultural.
3. Konsepsi politik dan kehidupan bernegara, yakni memandang negara kesatuan sebagai milik bersama dan tempat hidup bersama secara berkeadilan oleh semua komponen bangsa yang beragam identitas. Oleh karena itu, harus menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menjaga dan mempertahankannya.

Konsepsi-konsepsi ini mengandung nilai-nilai inti yaitu: 1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) tanggungjawab terhadap negara kesatuan; 3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya; 4) menjunjung tinggi supremasi hukum; dan 5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.

Nilai-nilai inti menjadi patokan dasar untuk mengembangkan proses pendidikan multikultural. Pengembangan diletakkan dalam kerangka berfikir filosofis rekonstruksi sosial (transformatif), psikologi sosio-historis kultural, dan

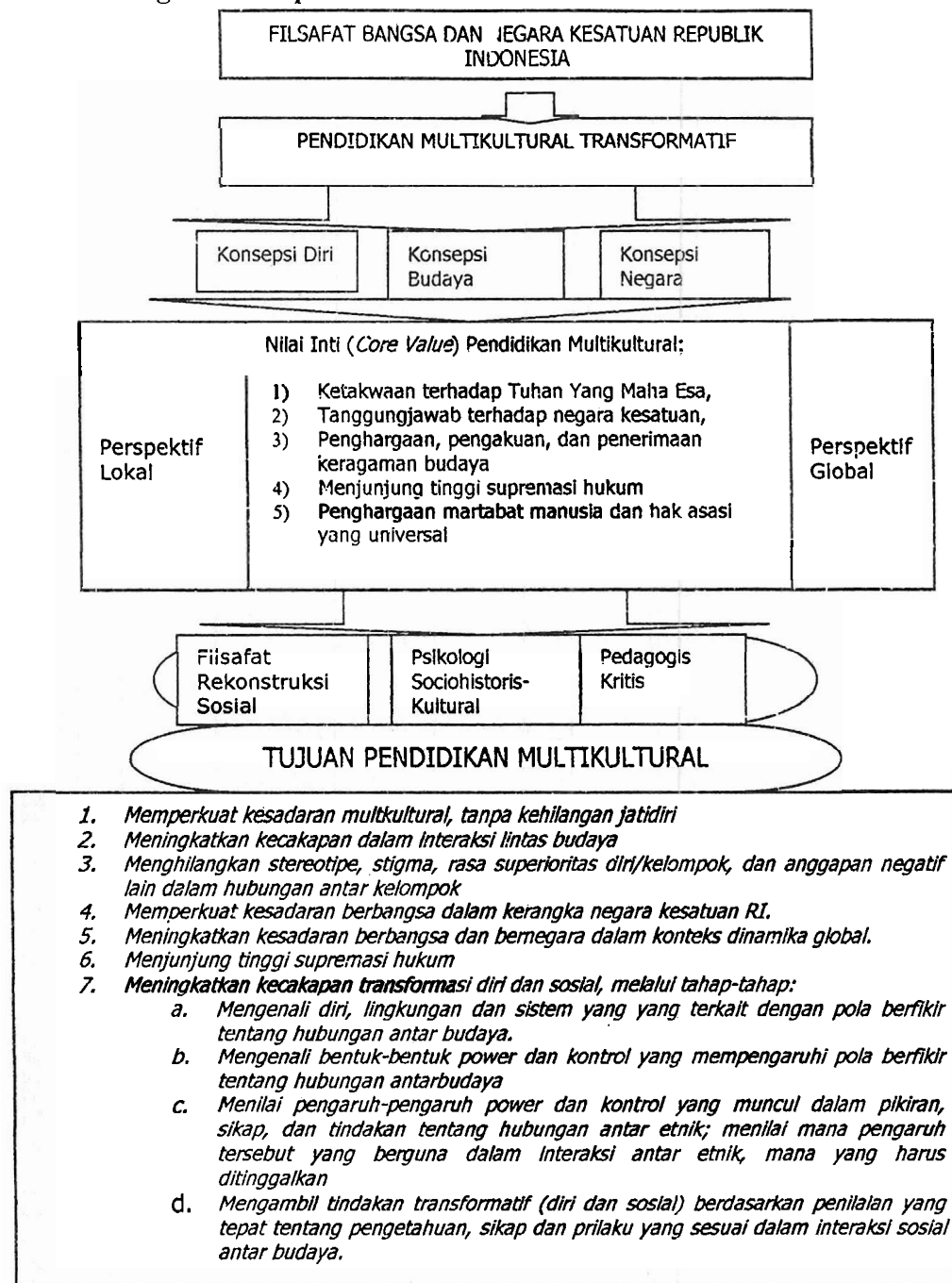
pedagogi kritis. Atas dasar ini, dapat dikembangkan tujuan umum yang akan dicapai melalui pendidikan multikultural transformatif yakni sebagai berikut.

1. Memperkuat kesadaran multikultural, tanpa kehilangan jati diri.
2. Meningkatkan kecakapan dalam interaksi lintas budaya.
3. Menghilangkan stereotipe, stigma, rasa superioritas diri/kelompok, dan anggapan negatif lain dalam hubungan antar budaya.
4. Memperkuat kesadaran berbangsa dalam kerangka negara kesatuan RI.
5. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks dinamika global.
6. Menjunjung tinggi supremasi hukum.
7. Meningkatkan kecakapan transformasi diri dan sosial, melalui tahap-tahap berikut.
 - a. Mengenali diri, lingkungan dan sistem yang terkait dengan pola berfikir tentang hubungan antar budaya.
 - b. Mengenali bentuk-bentuk power dan kontrol yang mempengaruhi pola berfikir tentang hubungan antar budaya.
 - c. Menilai pengaruh-pengaruh power dan kontrol yang muncul dalam pikiran, sikap, dan tindakan tentang hubungan antar budaya; menilai mana pengaruh tersebut yang berguna dalam interaksi antar budaya, dan mana yang harus ditinggalkan.
 - d. Mengambil tindakan transformatif (diri dan sosial) berdasarkan penilaian yang tepat tentang pengetahuan, sikap dan perilaku yang

- 1) Setiap orang memiliki kesadaran diri dan kelompok yang baik sebelum mereka bisa berempati dengan kelompok lain.
- 2) Sistem nilai dan cara berfikir seseorang tentang diri dan orang lain merupakan sesuatu yang dinamis dan berubah.
- 3) Pengetahuan tentang hal yang menyebabkan salah persepsi tentang orang lain membantu mengurangi stereotipe, stigma, dan rasa superioritas diri atau kelompok dalam hubungan dengan orang lain atau antar kelompok.
- 4) Setiap orang mampu melakukan transformasi sikap dan nilai-nilai dalam diri untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan.

Secara singkat gambaran kerangka konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif dapat dilihat dalam gambar berikut.

Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif



DAFTAR BACAAN

- Azra, Azyumardi (2003a) "Kerusuhan Massal di Indonesia Baru-Baru ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme", dalam INIS (ed). *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini. Seri INIS: 41*. Leiden-Jakarta 2003
- Banks, James (1997) *Educating Citizens in A Multicultural Society*. New York: Aliyn & Bacon
- Freire, Paulo (1998) *The Paulo Freire Readers*. Edited by Freire, Ana Maria & Macedo, Donald. New York: Continuum International Publication
- Makarim, Nono Anwar (2005) "Pemerintahan yang Lemah dan Konflik", dalam Anwar, Dewi Fortuna dkk (eds) *Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta; Yayasan Obor-LIPI
- NCSS (National Council for Social Studies (1994) *Expectations of Excellence. Curriculum standards for Social Studies*. Washington D.C: NCSS
- Nieto, Sonia (1992) *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman
- Patrick, John (1999) "Concepts at the Core of Education for Democratic Citizenship", dalam Bahmueller, Charles & Patrick, John (eds) *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Indianapolis, IN: ERIC Clearinghouse
- Suseno, Franz Magnis (2003) "Faktor-faktor yang Melandasi Terjadinya Konflik Antar Etnis dan Agama di Indoneisa", dalam INIS (ed). *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini. Seri INIS: 41*: Leiden-Jakarta 2003
- Varshney, Ashutosh (2002) *Ethnic Conflict and Civic Life*. New Haven & London: Yale University Press
- Wiriaatmadja, Rochiati (1992) Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional. *Disertasi*. Program Pascasarjana IKIP Bandung